



DP3APPKB
SURABAYA

LAPORAN KINERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



DP3APPKB SURABAYA

PEMERINTAH
KOTA SURABAYA

TAHUN
2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL	2
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 GAMBARAN UMUM	2
I.2.1 Sumber Daya Manusia	2
I.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
I.2.3 Landasan Hukum	5
I.2.4 Struktur Organisasi.....	6
I.3 ISU-ISU STRATEGIS	8
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
II.1 PERENCANAAN STRATEGIS	14
II.1.1 Tujuan dan Sasaran	14
II.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA	21
II.3 PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	38
III.1 CAPAIAN KINERJA	38
III.1.1 Capaian realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	43
III.2 AKUNTABILITAS ANGGARAN	60
BAB IV PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan	2
Tabel 1. 2 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan	3
Tabel 1. 3 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Penempatannya	3
Tabel 2. 1 Visi dan Misi Kota Surabaya yang menjadi acuan Perangkat Daerah	14
Tabel 2. 2 Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	16
Tabel 2. 3 Hubungan Sasaran, Program dan Kegiatan	17
Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama	21
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	22
Tabel 2. 6 Anggaran Per Program	23
Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022	24
Tabel 2. 8 Anggaran Program dan Kegiatan	34
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran	38
Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja sampai dengan Tahun Sebelumnya	41
Tabel 3. 3 Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	44
Tabel 3. 4 Realisasi Anggaran Tahun 2022	60
Tabel 3. 5 Capaian Realisasi Kinerja Dan Capaian Realisasi Anggaran Level Tujuan Dan Sasaran	65
Tabel 3. 6 Efisiensi Penggunaan Anggaran	66

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 18 disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja sebagai hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *disclosure* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 ini memberikan gambaran utuh terkait dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana. Laporan Kinerja tersebut juga memaparkan perencanaan strategis sesuai dengan misi, tujuan, dan sasaran yang diampu, serta pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2022. Selain itu dijabarkan juga Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2022 beserta seluruh indikator kinerja dan targetnya, hasil capaian kinerja dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Dokumen Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perencanaan strategis pada tahun-tahun berikutnya, sehingga perencanaan Perangkat Daerah menjadi berkesinambungan.

I.2 GAMBARAN UMUM

I.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di dukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) dengan rincian, sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	1

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
4	Fungsional (Sub Koordinator)	7
5	Staff (PNS)	11
6	CPNS	1
7	Tenaga Outsorcing	103
Jumlah		128

Tabel 1. 2 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Golongan IV	4
2	Golongan III	14
3	Golongan II	4
4	Golongan I	0
5	Tenaga Outsorcing	103
Jumlah		128

Tabel 1. 3 Jumlah Sumber Daya Manusia Berdasarkan Penempatannya

No.	Unit Kerja	Status Pegawai			Jumlah per Unit Kerja
		PNS	CPNS	Tenaga Outsorcing	
1	Sekretariat	9	0	38	47
2	Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak	3	0	28	31
3	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	3	0	17	20
4	Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	9	1	20	30
Jumlah (orang)		24	1	103	128

Pada Tahun 2022 di Sekretariat didukung personil sejumlah 9 orang PNS dan 38 Tenaga Outsourcing yang terdiri dari 6 orang satgas outreach, 9 orang tenaga keamanan dinas, 7 orang tenaga operasional, 12 orang tenaga administrasi dan sejumlah 4 orang untuk ditempatkan sebagai Satgas Command Center.

Pada bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak didukung 3 orang PNS dan 28 orang tenaga outsourcing yang terdiri dari petugas Shelter ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) sejumlah 9 orang, di Shelter Perempuan sejumlah 9 orang dan 10 orang sebagai tenaga administrasi.

Pada bidang Perlindungan Perempuan dan Anak didukung 3 orang PNS dan 17 orang tenaga outsourcing yang ditempatkan di PUSPAGA sebagai konselor sejumlah 5 orang dan 12 orang sebagai tenaga administrasi maupun pendamping.

Pada bidang Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdapat 9 orang PNS, 1 CPNS dan 20 orang outsourcing yang terdiri dari 2 orang ditempatkan sebagai SPG di stand UMKM rumah kreatif Bungurasih dan Balai Kota, 18 orang sebagai tenaga administrasi maupun pendamping.

I.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

I.2.3 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

I.2.4 Struktur Organisasi

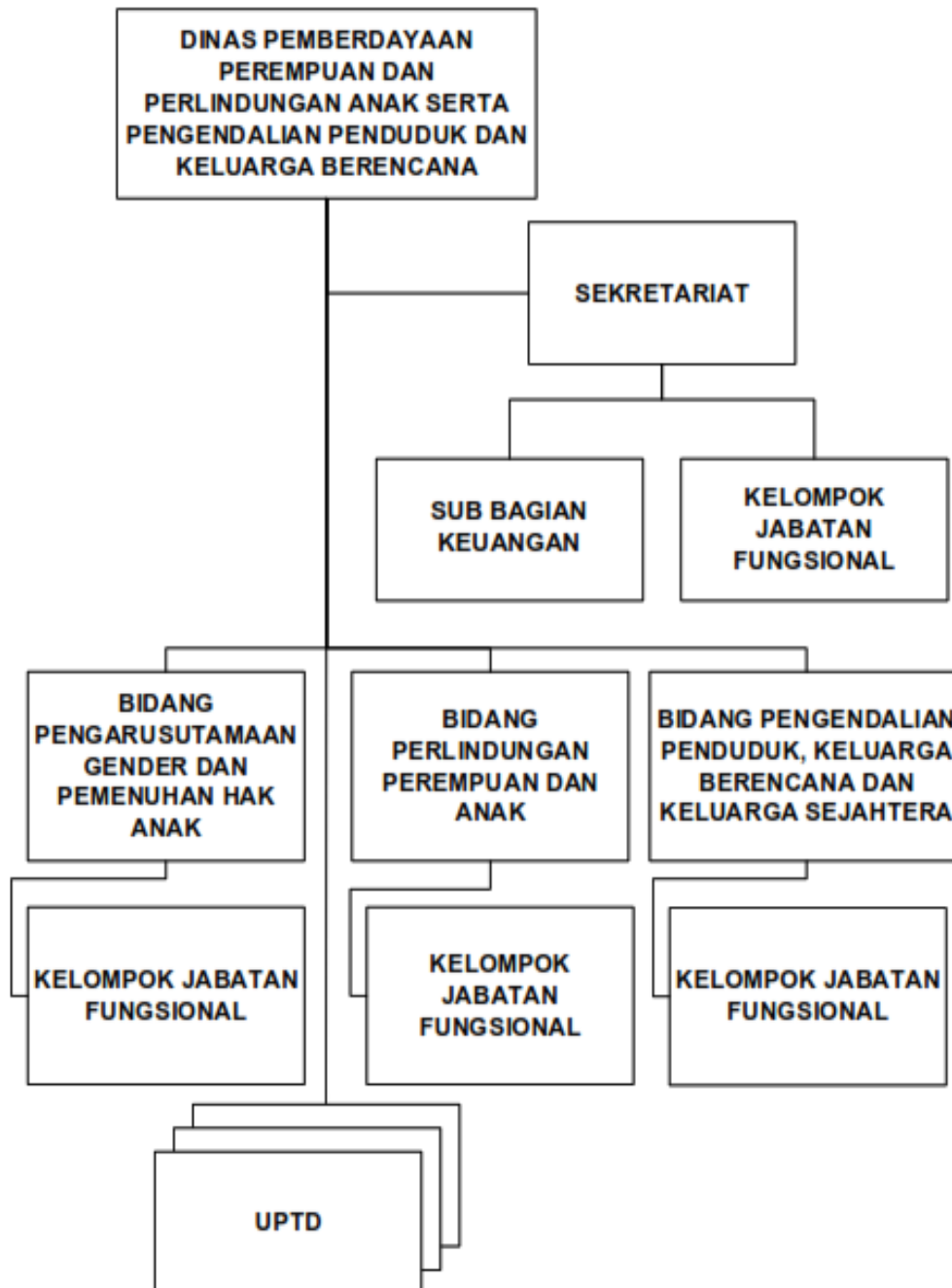
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak
3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
4. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
5. UPTD.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan penjelasan di atas dapat digambarkan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022 sebagai berikut.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SURABAYA



I.3 ISU-ISU STRATEGIS

- 1) Isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:
 - a. Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui Keluarga Berencana sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.
 - b. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pasti akan terjadi setiap tahun, tindak kekerasan yang terjadi umumnya adalah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), non KDRT, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan *trafficking* (perdagangan orang).
 - c. Salah satu program untuk pencegahan kemiskinan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui penyejahteraan keluarga. Upaya preventif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pendampingan kelompok tribina yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL).
 - d. Masih adanya ketimpangan gender yang terjadi baik di pemerintahan maupun masyarakat dalam pemenuhan indikator 7 prasyarat pengarusutamaan gender (PUG).

- 2) Isu Nasional dan Global yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan harapan pencapaian pada tahun 2030. 17 target sasaran utama:
 1. Tanpa Kemiskinan;
 2. Tanpa Kelaparan;
 3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan;
 4. Pendidikan berkualitas
 5. Kesetaraan Gender
 6. Air Bersih dan Sanitasi
 7. Energi Bersih dan Terjangkau
 8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak
 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
 10. Mengurangi Kesenjangan
 11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas
 12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab

13. Aksi Terhadap Iklim
14. Kehidupan Bawah Laut
15. Kehidupan di Darat
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Beberapa indikator SDGs yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
2. Pada tahun 2030, membangun ketahanan keluarga dengan mengoptimalkan penerapan 8 fungsi keluarga yang terintegrasi dengan berbagai sektor.
3. Akhiri semua bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan.
4. Hilangkan semua bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan swasta, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta jenis-jenis eksploitasi lainnya.
5. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan maupun perundang-undangan yang berlaku untuk meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan anak perempuan di semua tingkatan.
6. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.

3) Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan Hambatan yang muncul bisa diidentifikasi melalui analisa kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kekuatan yang dimiliki terdiri dari:
 1. Anggaran kegiatan
 2. Pengarusutamaan program dan anggaran yang responsif gender
 3. Sarana dan Prasarana perkantoran

4. Kewenangan untuk melaksanakan program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 5. Kewenangan untuk melaksanakan program Program Pengendalian Penduduk
 6. Kewenangan untuk melaksanakan program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 7. Kewenangan untuk melaksanakan program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 8. Kewenangan untuk melaksanakan program Peningkatan Kualitas Keluarga
 9. Kewenangan untuk melaksanakan program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
 10. Kewenangan untuk melaksanakan program Perlindungan Perempuan
 11. Kewenangan untuk melaksanakan program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 12. Kewenangan untuk melaksanakan program Perlindungan Khusus Anak
 13. Kewenangan untuk melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 14. Dokumen Manajemen Risiko
 15. Proses Bisnis Instansi dan SOP untuk pelaksanaan kegiatan
- b. Kelemahan yang dimiliki terdiri dari:
1. Jumlah dan Kompetensi SDM
 2. Jumlah dan kondisi kelayakan kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
 3. Pemanfaatan data penjangkauan masyarakat
 4. Tata letak ruang perkantoran yang kurang memadai

4) Peluang dan Tantangan

Peluang dan tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peluang yang dimiliki terdiri dari:
1. Tersedianya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak, pemberdayaan perempuan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 2. Dukungan masyarakat dan lembaga berbasis masyarakat;
 3. Dukungan pihak swasta, akademisi dan instansi pemerintah lainnya;

4. Sinergitas pemberdayaan masyarakat antar OPD;
5. Terbitnya Surat Mendagri tentang kewajiban untuk membentuk UPTD PPA sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memperkuat kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari sebelumnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTP2A);
6. Integrasi program yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TGB/SDGs) dalam pelaksanaan praktik keterbukaan pemerintah melalui penyelarasan Rencana Aksi Nasional terkait HAM, percepatan penurunan angka stunting dan pelayanan keluarga berencana;
7. Puncak bonus demografi di tahun 2020-2035 menjadi kesempatan emas dalam peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas khususnya pada peningkatan kualitas anak dan perempuan dalam pemahaman kesehatan reproduksi dan pembangunan keluarga;
8. Kemudahan dan kecepatan akses informasi yang membawa dampak globalisasi terhadap kecenderungan perubahan nilai budaya, pola pikir, pola sikap dan pola perilaku manusia, terutama generasi muda.

b. Ancaman yang dimiliki antara lain:

1. Penduduk luar Kota Surabaya yang memanfaatkan fasilitas dan layanan Pemerintah Kota Surabaya.
2. Mentalitas sebagian masyarakat miskin.
3. Masih ada sedikit program dan kegiatan antar Perangkat Daerah yang beririsan.
4. Adanya data diluar data keluarga miskin yang telah ditetapkan.
5. Pengaruh media sosial terhadap tumbuh kembang anak.

5) Formulasi Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Formulasi Isu-isu penting/Strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022, isu-isu tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 1. Masih belum optimalnya upaya perlindungan perempuan dan anak, hal ini bisa dilihat bahwa terjadi peningkatan permasalahan perempuan dan anak antara lain trafficking, permasalahan remaja lainnya yang salah satunya dipicu oleh dampak pandemi Covid-19.
 2. Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak.
 3. Pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi belum sepenuhnya optimal.
 4. Masih adanya ketimpangan gender yang terlihat dari pemahaman konsep dan praktis dari pengarusutamaan (PUG) sendiri yang masih cenderung mendefinisikan PUG sebagai program-program yang terkait perempuan semata.
 5. Sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan melalui perwujudan Kota Layak Anak yang mendunia.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 1. Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan adanya peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi.
 2. Masih adanya pasangan usia subur yang tidak terpenuhi kebutuhan KB (unmet need).
 3. Masih ada pasangan usia subur (PUS) yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun.
 4. Sebagai kota metropolitan, Surabaya sulit mengendalikan penduduk musiman yang berasal dari luar daerah atau masyarakat yang bekerja / beraktivitas di Kota Surabaya.
 5. Masih adanya generasi stunting yang perlu mendapatkan penanganan khusus hingga mencapai Zero Stunting.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya Tahun 2022 ini disusun sesuai sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I PENDAHULUAN
 - A. LATAR BELAKANG
 - B. GAMBARAN UMUM
 - C. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
 - D. ISU-ISU STRATEGIS
 - E. LANDASAN HUKUM
 - F. SISTEMATIKA PENULISAN
- Bab II PERENCANAAN KINERJA
 - A. PERENCANAAN STRATEGIS
 - B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
 - C. PERJANJIAN KINERJA
- Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. CAPAIAN KINERJA
 - B. REALISASI ANGGARAN
- Bab IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Pemerintah Kota Surabaya di tahun 2021-2026, memiliki 1 visi yang didukung dengan 5 misi. Dari 5 misi tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menindaklanjuti misi ke-2, yaitu “Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya”.

Secara formal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan agar setiap Instansi pemerintah bertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (*strategic planning*). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Perangkat Daerah, melalui perencanaan strategis diharapkan memiliki peran sentral dalam pelaksanaan pemerintahan.

II.1.1 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan RPJMD 2021-2026 maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menetapkan tujuan pembangunan mengacu pada Misi ke-2 Kota Surabaya adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Visi dan Misi Kota Surabaya yang menjadi acuan Perangkat Daerah

VISI : GOTONG ROYONG MENUJU KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS, DAN BERKELANJUTAN	
Misi Kota Surabaya (RPJMD Tahun 2021-2026)	Tujuan / Sasaran Perangkat Daerah (Renstra Tahun 2021-2026)
Misi 1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya	

VISI : GOTONG ROYONG MENUJU KOTA DUNIA YANG MAJU, HUMANIS, DAN BERKELANJUTAN	
Misi Kota Surabaya (RPJMD Tahun 2021-2026)	Tujuan / Sasaran Perangkat Daerah (Renstra Tahun 2021-2026)
sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional	
Misi 2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul berkarakter, sehat jasmani rohani, produktif, religius, berbudaya dalam bingkai kebhinnekaan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan serta kebutuhan dasar lainnya	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya
	Mewujudkan keluarga yang berkualitas
	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk
	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak
	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan
	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak
Misi 3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan	
Misi 4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	
Misi 5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan	

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan permasalahan yang tengah dihadapi serta upaya mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keluarga yang berkualitas

2. Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk
3. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan
5. Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak

Tabel 2. 2 Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Bangga Kencana	Mewujudkan keluarga yang berkualitas	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)
		Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)
			Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Specific Fertility Rate) per 1000 wanita
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender
		Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum

Untuk mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh beberapa program dan kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 2. 3 Hubungan Sasaran, Program dan Kegiatan

Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
Mewujudkan keluarga yang berkualitas	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4		
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal		
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			Pembinaan Terpadu Kampung KB
					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB

Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
		di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

II.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut berdasarkan RPJMD 2021-2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut.

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data
1	Sasaran: Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. [600]	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.		Penghitungan dilakukan oleh Inspektorat.	DP3AP PKB
2	Sasaran: Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak. [102]	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum.	%	(Kasus permasalahan perempuan dan anak - kasus yang berhadapan dengan hukum) / Jumlah kasus permasalahan perempuan dan anak * 100%.	DP3AP PKB
3	Sasaran: Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. [103]	Indeks Pemberdayaan Gender.	%	Komponen keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional,	DP3AP PKB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formulasi	Sumber Data
				manajer, administrasi, dan teknisi serta sumbangan pendapatan.	
4	Sasaran: Mewujudkan keluarga yang berkualitas. [388]	Indeks pembangunan keluarga (ibangga) .	%	Survey keluarga Nilai : <40 = rentan (kurang baik) 40-70 = berkembang (cukup baik) >70 = tangguh (baik).	DP3AP PKB
5	Sasaran: Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. [386]	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita.		Kelahiran per 1000 WUS kelompok umur 15 - 19 tahun (Catatan : Lower is better).	DP3AP PKB
		Angka Kelahiran Total (TFR)	%	TFR = 5? ASFR (Catatan : Lower is better)	DP3AP PKB

II.3 PERJANJIAN KINERJA

Dari IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut, dirumuskan target untuk masing-masing IKU dan indikator pendukung pelaksanaan IKU lainnya sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis. Di tahun 2022, telah dirumuskan target tersebut dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2022 yang telah diubah menjadi Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2022 dengan rincian, sebagai berikut.

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. [600]	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.	84.015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak. [102]	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum.	81,79%
3	Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. [103]	Indeks Pemberdayaan Gender.	83.16%
4	Mewujudkan keluarga yang berkualitas. [388]	Indeks pembangunan keluarga (ibangga) .	54.38%
5	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk. [386]	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita.	26
		Angka Kelahiran Total (TFR)	1.78%

Tabel 2. 6 Anggaran Per Program

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.[2.08.01]	Rp13.508.832.188
2	Program Peningkatan Kualitas Keluarga.[2.08.04]	Rp535.997.654
3	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.[2.08.02]	Rp2.138.359.574
4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (ks).[2.14.04]	Rp15.278.257.908
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.[2.08.05]	Rp296.175.042
6	Program Pengendalian Penduduk.[2.14.02]	Rp371.711.100
7	Program Perlindungan Perempuan.[2.08.03]	Rp487.687.141
8	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).[2.08.06]	Rp2.491.678.037
9	Program Perlindungan Khusus Anak.[2.08.07]	Rp1.269.865.858
10	Program Pembinaan Keluarga Berencana (kb).[2.14.03]	Rp10.415.407.511
TOTAL		Rp46.793.972.013

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2. 7 Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022	Satuan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Median usia kawin pertama perempuan	20	tahun
		Persentase balita yang mengikuti PAUD	41,53	%
		Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	39,24	%
		Persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya	40	%
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Lansia	1	laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Remaja	1	laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1	laporan	
	Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Balita	1	laporan	
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah keluarga kelompok tribina yang dibentuk dan diadvokasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	160	keluarga	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan	Jumlah sarana kelompok BKB yang disediakan (DAK)	28	paket	

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022	Satuan
	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok BKR yang disediakan (DAK)	16	paket
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah keluarga BKB yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	344	keluarga
		Jumlah keluarga BKL yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	113	keluarga
		Jumlah keluarga BKR yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	54	keluarga
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	31	kecamatan
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah keluarga MBR sebagai Akseptor KB yang diintervensi	14	keluarga
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	30,15	%
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan sampai terbentuk SSK	70	Sekolah

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022	Satuan
	Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	140	Orang
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58	Perangkat Daerah
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	dokumen
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk, selanjutnya disosialisasikan kepada mitra kerja agar memiliki pengetahuan kependudukan	1	dokumen
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	18,55	%
		Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	82	%
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31	kecamatan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022	Satuan
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	laporan
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1	laporan
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12	Kali
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah pelaksanaan pertemuan pembinaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan RW (Sub KKBPK) di 31 kecamatan melalui DAK	12	kali
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah IMP yang berperan serta dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	1566	Orang
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	303734	Orang
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi tanpa putus	301784	Orang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022	Satuan
	Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui DAK	1950	orang
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana KB yang disediakan melalui DAK	37	unit
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB melalui DAK	4	Laporan
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina melalui DAK	31	Kecamatan
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	31	Kampung
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100	%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100	%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100	%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang dan jasa sesuai kode rekening yang direalisasi	23	Rekening

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022	Satuan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100	%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran sesuai kode rekening yang direalisasi	20	Rekening
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100	%
		Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100	%
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3	Dokumen
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang responsif gender	58	Lembaga
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	4	Kali
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21	Kegiatan
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah peserta kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	1132	Orang

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022	Satuan
	Kewenangan Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100	%
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai data gender dan anak	58	Lembaga
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi penyusunan Data Terpilah	2	Kali
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking $\leq 1 \times 24$ jam	100	%
		Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	32,25	%
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	31	kasus

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022	Satuan
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang diterima dan yang ditindaklanjuti	31	kasus
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	31	kasus
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	10	kecamatan
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah personil PKBM yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	100	orang
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	209	
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	12	laporan
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga yang dikelola selama 12 bulan	2	lembaga
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Kelurahan Layak Anak	47,4	%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022	Satuan
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1	kegiatan
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan	42	Kelurahan
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3	kegiatan
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Shelter yang diselenggarakan Operasionalnya Selama 12 Bulan	2	Lembaga
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina dan didampingi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak	431	Lembaga
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking $\leq 1 \times 24$ jam	100	%
		Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	32,25	%
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	3	Kegiatan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022	Satuan
	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	dokumen
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	10	lembaga
		Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150	kasus
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang diterima	150	kasus
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150	kasus
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Kegiatan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen

Dalam melaksanakan kegiatan pada tahun 2022 Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya telah melakukan perjanjian kinerja sesuai dengan indikator kinerja dan target yang telah disepakati dan tertuang dalam kontrak kinerja. Adapun rincian anggaran per kegiatan pada masing-masing program tertuang pada Tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2. 8 Anggaran Program dan Kegiatan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Rp15.278.257.908
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp15.278.257.908
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Rp979.104.000
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp747.866.000
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp327.689.657
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp12.820.360.000
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp403.238.251
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Rp371.711.100
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp206.313.000
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Rp206.313.000
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp165.398.100
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Rp45.510.000
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rp119.888.100
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Rp10.415.407.511

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp523.600.000
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Rp483.600.000
	Pengendalian Program KKBPK	Rp40.000.000
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp1.985.449.599
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Rp1.144.984.999
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp840.464.600
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.317.357.912
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp1.002.814.512
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp5.294.543.400
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rp1.020.000.000
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp589.000.000
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Rp189.427.500
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Rp399.572.500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp13.508.832.188
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp10.413.192.093
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp10.413.192.093
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp2.630.966.677
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp2.630.966.677
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp464.673.418
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp464.673.418
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Rp2.138.359.574
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp732.270.218
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp732.270.218
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp362.024.863

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp362.024.863
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp1.044.064.493
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp1.044.064.493
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Rp296.175.042
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp296.175.042
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp296.175.042
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rp487.687.141
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp35.377.040
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp35.377.040
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp176.712.000
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp113.500.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp63.212.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp275.598.101
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp275.598.101
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Rp535.997.654
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp535.997.654
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp535.997.654
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Rp2.491.678.037
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp558.575.890
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp558.575.890

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp1.933.102.147
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp1.335.268.652
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp597.833.495
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Rp1.269.865.858
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp77.572.960
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp77.572.960
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.115.486.898
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp916.654.898
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp198.832.000
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp76.806.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp76.806.000
Total		Rp46.793.972.013

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA

Dalam subbab ini disampaikan capaian kinerja berdasarkan realisasi baik kinerja maupun realisasi kegiatan yang dicapai dari target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dan penjelasan atas capaian dimaksud dengan data-data pendukung. Selain itu, juga menyampaikan efisiensi penggunaan sumber daya, faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja tersebut dan rencana tindak lanjut dalam mengatasi tantangan dan hambatan tersebut.

Keberhasilan kinerja pemerintah dapat dilihat dari capaian atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diukur dengan melihat realisasi dari target indikator kinerja yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja 2022 yang telah diubah menjadi Perjanjian Kinerja Perubahan APBD Tahun 2022. Berdasarkan data di E-Monev 2022 Realisasi dan capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARG ET	Realisasi Per Triwulan				REALI SASI	CAPAI AN
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum	81,79%	83,87 %	84,85 %	82,24 %	83,85 %	83,85%	102,52%
2	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	83,16%	0	0	0	82,82 %	82,82%	99,59%
3	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	26	0	0	0	18	18	130,77%
4	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita	1,78%	0	0	0	1,83 %	1,83%	97,13%

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARG ET	Realisasi Per Triwulan				REALI SASI	CAPAI AN
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
5	Mewujudkan keluarga yang berkualitas	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	54,38%	0	0	0	56,71 %	56,71%	104,28%
6	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	84,015	0	0	0	93,66	93,66	111,48%

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tujuan pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya diputuskan berdasar pada RPJMD 2021-2026 dengan indikator kinerja Indeks Bangga Kencana. Indeks Bangga Kencana adalah indeks pencapaian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana. Program Bangga Kencana yang merupakan akronim dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana menjadi salah satu program unggulan dari BKKBN. Bangga Kencana menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan serta berfokus mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pada tahun 2022 berdasarkan data pada E-monev tahun 2022 memiliki target 65,05% dan diperoleh realisasi 61,23% dengan capaian 94,13%.

Tujuan kedua yaitu meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhitungkan ketimpangan gender dan memiliki formulasi rata-rata pencapaian usia harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan disesuaikan dengan mengakomodasikan perbedaan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dengan target yang harus dicapai 93,73%. Pada tahun 2022 berdasarkan data pada E-monev tahun 2022 diperoleh realisasi 93,9% dengan capaian 100,18%. Berdasarkan realisasi tersebut maka Pembangunan Kota Surabaya sudah Responsif Gender dapat dilihat dari Indeks

Pembangunan Gender Kota Surabaya yang mengalami peningkatan berkat peran serta dan kerjasama antar Lembaga Pemerintah, Kelompok Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan Dunia Usaha dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender.

Sasaran meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak dengan indikator Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum memiliki target 81,79%, realisasi 83,85% dengan capaian 102,52%. Kedua meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender memiliki target 83,16%, realisasi 82,82% dengan capaian 99,59%. Ketiga terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan indikator pertama Angka Kelahiran Total (TFR) memiliki target 26, realisasi 18 dengan capaian 130,77%. Indikator kedua Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita memiliki target 1,78%, realisasi 1,83% dengan capaian 97,13%. Keempat Mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan indikator Indeks pembangunan keluarga (ibangga) memiliki target 54,38%, realisasi 56,71% dengan capaian 104,28%. Kelima Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki target 84,015, realisasi 93,66 dengan capaian 111,48%.

Selanjutnya, mengacu pada RPJMD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021-2026, maka t0 adalah tahun 2021 (masih mengacu pada P-RPJMD Tahun 2016-2021) sehingga tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan kegiatan yang menjabarkan Visi Walikota Surabaya yaitu Gotong Royong Menuju Kota Dunia Yang Maju, Humanis, Dan Berkelanjutan. Maka terdapat perbedaan indikator yang menyebabkan tidak ada perbandingan capaian tahun 2022 dengan tahun sebelumnya. Sehingga untuk menunjukkan progress kinerja Perangkat Daerah yang menjabarkan RPJMD Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 maka disajikan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan target akhir RPJMD pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Sasaran Kinerja sampai dengan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi					Target Akhir RPJMD	Progres Capaian
				2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Bangga Kencana	65,05	57,50	0	0	0	0	72,69	79,10%
1.1	Mewujudkan keluarga yang berkualitas	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	54,38%	56,71%	0	0	0	0	60,12%	94,33%
1.2	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	1,78%	1,83%	0	0	0	0	1,72%	93,60%
		Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita	26	18	0	0	0	0	24	125,00%
2	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	93,73	93,9	0	0	0	0	93,78	100,13%
2.1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	84,015	93,66	0	0	0	0	84,915	110,30%
2.2	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	83,16%	82,82%	0	0	0	0	83,36%	99,35%

Tujuan meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya memiliki indikator kinerja Indeks Bangga Kencana dengan realisasi tahun 2022 sebesar 61,23 dan target akhir RPJMD 72,69 sehingga progres capaian 84,23%. Sasaran mewujudkan keluarga yang berkualitas memiliki indikator kinerja Indeks pembangunan keluarga (ibangga) dengan realisasi tahun 2022 sebesar 55,47% dan target akhir RPJMD 60,12% sehingga progres capaian 92,27%. Sasaran terkendalnya laju pertumbuhan penduduk memiliki dua indikator kinerja dengan cara perhitungan *lower is better*. Pertama, Angka Kelahiran Total (TFR) dengan realisasi tahun 2022 sebesar 1,8% dan target akhir RPJMD 1,72% sehingga progres capaian 95,35%. Kedua, Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / *Age Spesific Fertility Rate*) per 1000 wanita dengan realisasi tahun 2022 sebesar 18,9 dan target akhir RPJMD 24 sehingga progres capaian 121,25%.

Tujuan meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak memiliki indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender dengan realisasi tahun 2022 sebesar 93,9 dan target akhir RPJMD 93,78 sehingga progres capaian 100,13%. Sasaran meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan realisasi tahun 2022 sebesar 93,66 dan target akhir RPJMD 84,915 sehingga progres capaian 110,30%. Sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan memiliki indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender dengan realisasi tahun 2022 sebesar 82,82% dan target akhir RPJMD 83,36% sehingga progres capaian 99,35%. Sasaran meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak memiliki indikator kinerja Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum dengan realisasi tahun 2022 sebesar 83,33% dan target akhir RPJMD 85,88% sehingga progres capaian 97,03%.

Selain itu juga diperlukan data realisasi ditingkat provinsi dan pusat untuk menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah merupakan implementasi dari program kerja ditingkat pusat. Berikut realisasi indikator kinerja pusat dan provinsi yang selaras dengan indikator kinerja perangkat daerah.

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Pemerintah Provinsi/Pusat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi PD/Kota	Realisasi Provinsi	Realisasi Pusat
1	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum	83,85%	-	-
2	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	82,82	72,36	76,26
3	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	18	2,45	-
4	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Specific Fertility Rate) per 1000 wanita	1,83	1,9	-
5	Mewujudkan keluarga yang berkualitas	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	56,71	-	-
6	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	93,66	83,17	71,30

III.1.1 Capaian realisasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Dalam menjalankan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan beberapa program yang kemudian diwujudkan dalam

beberapa sub kegiatan. Pada tahun 2022 terdapat 10 (sepuluh) program yang dilaksanakan, dengan jumlah kegiatan 23 (dua puluh tiga) dan jumlah sub kegiatan 36 (tiga puluh enam). Adapun realisasi dan capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3. 4 Realisasi dan Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target Tahun 2022		Realisasi	Capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median usia kawin pertama perempuan	20	tahun	23,33	116,65 %
	Persentase balita yang mengikuti PAUD	41,53	%	43,21	104,05 %
	Persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial	39,24	%	121,06	308,52 %
	Persentase peserta UPPKA yang meningkatkan pendapatannya	40	%	42,86	107,15 %
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Lansia	1	laporan	1	100,00 %
	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Remaja	1	laporan	1	100,00 %
	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1	laporan	1	100,00 %
	Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Bina Keluarga Balita	1	laporan	1	100,00 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022		Realisasi	Capaian
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah keluarga kelompok tribina yang dibentuk dan diadvokasi terkait ketahanan dan kesejahteraan keluarga	160	keluarga	160	100,00 %
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah sarana kelompok BKB yang disediakan (DAK)	28	paket	28	100,00 %
		Jumlah sarana kelompok BKR yang disediakan (DAK)	16	paket	16	100,00 %
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah keluarga BKB yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	344	keluarga	344	100,00 %
		Jumlah keluarga BKL yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	113	keluarga	113	100,00 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022		Realisasi	Capaian
		Jumlah keluarga BKR yang mendapatkan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	54	keluarga	54	100,00 %
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Penyediaan biaya operasional bagi kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (DAK)	31	kecamatan	31	100,00 %
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah keluarga MBR sebagai Akseptor KB yang diintervensi	14	keluarga	14	100,00 %
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan	30,15	%	24,45	81,09 %
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sekolah setingkat SLTP / MTS, yang mendapatkan materi kependudukan sampai terbentuk SSK	70	Sekolah	54	77,14 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022		Realisasi	Capaian
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah peserta sosialisasi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan	140	Orang	133	95,00 %
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kerja yang mendapat sosialisasi kependudukan	58	Perangkat Daerah	58	100,00 %
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1	dokumen	1	100,00 %
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pemetaan dalam rangka pengendalian penduduk, selanjutnya disosialisasikan kepada mitra kerja agar memiliki pengetahuan kependudukan	1	dokumen	1	100,00 %
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi	18,55	%	21,39	84,69 %
		Persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi	82	%	93,41	113,91 %
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Mini Lokakarya	31	kecamatan	31	100,00 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022		Realisasi	Capaian
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1	laporan	1	100,00 %
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1	laporan	1	100,00 %
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Pertemuan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB) bersama dengan kader IMP	12	Kali	12	100,00 %
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah pelaksanaan pertemuan pembinaan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan (PPKBK) dan RW (Sub KKBPK) di 31 kecamatan melalui DAK	12	kali	12	100,00 %
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah IMP yang berperan serta dalam pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	1566	Orang	1566	100,00 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022		Realisasi	Capaian
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern (mCPR)	30373 4	Orang	303968	100,08 %
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi tanpa putus	30178 4	Orang	301784	100,00 %
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) melalui DAK	1950	orang	2184	112,00 %
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana KB yang disediakan melalui DAK	37	unit	37	100,00 %
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan di Kampung KB melalui DAK	4	Laporan	4	100,00 %
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang terbentuk dan dibina melalui DAK	31	Kecamatan	31	100,00 %
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	31	Kampung	31	100,00 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022		Realisasi	Capaian
		Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100	%	93,04	93,04 %
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	100	100,00 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100	%	100	100,00 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	100	100,00 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang dan jasa sesuai kode rekening yang direalisasi	23	Rekening	23	100,00 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Perangkat Daerah	100	%	100	100,00 %
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran sesuai kode rekening yang direalisasi	20	Rekening	20	100,00 %
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor ipoleksosbud	100	%	102,94	102,94 %
		Persentase Perangkat Daerah yang responsif gender	100	%	100	100,00 %
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jenis dokumen PPRG yang disusun oleh perangkat daerah	3	Dokumen	3	100,00 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022		Realisasi	Capaian
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang responsif gender	58	Lembaga	58	100,00 %
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	600	Orang	600	100,00 %
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kegiatan advokasi dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan	4	Kali	4	100,00 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	21	Kegiatan	20	95,24 %
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta kegiatan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	1132	Orang	1132	100,00 %
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak	100	%	100	100,00 %
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data	Jumlah perangkat daerah yang	58	Lembaga	58	100,00 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022		Realisasi	Capaian
	Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	mempunyai data gender dan anak				
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan sosialisasi penyusunan Data Terpilah	2	Kali	2	100,00 %
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking $\leq 1 \times 24$ jam	100	%	100	100,00 %
		Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan	32,25	%	32,26	100,03 %
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan	1	100,00 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100,00 %
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan dan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	31	kasus	38	122,58 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022		Realisasi	Capaian
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang diterima dan yang ditindaklanjuti	31	kasus	38	122,58 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan rujukan lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	31	kasus	38	122,58 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	10	kecamatan	10	100,00 %
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah personil PKBM yang responsif terhadap penanganan permasalahan perempuan	100	orang	133	133,00 %
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	209		322	154,07 %
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai	12	laporan	12	100,00 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022		Realisasi	Capaian
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan keluarga yang dikelola selama 12 bulan	2	lembaga	2	100,00 %
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Kelurahan Layak Anak	47,4	%	61,69	130,15 %
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator kota layak anak	1	kegiatan	1	100,00 %
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelurahan layak anak yang dibina dan dikembangkan	42	Kelurahan	42	100,00 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kegiatan yang memfasilitasi dalam upaya pencapaian indikator Kota Layak Anak	3	kegiatan	3	100,00 %
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Shelter yang diselenggarakan Operasionalnya Selama 12 Bulan	2	Lembaga	2	100,00 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022		Realisasi	Capaian
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibina dan didampingi dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak	431	Lembaga	447	103,71 %
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking $\leq 1 \times 24$ jam	100	%	100	100,00 %
		Persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	32,25	%	32,26	100,03 %
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	3	Kegiatan	3	100,00 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	1	100,00 %
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat	Jumlah lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak	10	lembaga	10	100,00 %
		Jumlah pengaduan dan layanan pendampingan	150	kasus	154	102,67 %

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator	Target Tahun 2022		Realisasi	Capaian
	Daerah Kabupaten/Kota	anak yang memerlukan perlindungan khusus				
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang diterima	150	kasus	154	102,67 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus	150	kasus	154	102,67 %
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2	Kegiatan	2	100,00 %
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1	dokumen	1	100,00 %

Pada bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesejahteraan Keluarga terdapat pelaksanaan tiga program sebagai berikut.

Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan indikator pertama, median usia kawin pertama perempuan memiliki target 20 tahun, realisasi 23,33 tahun, dan capaian 116,65%. Target dapat tercapai karena adanya program BKKBN yang didukung oleh komitmen DP3APPKB terkait penundaan usia perkawinan melalui pembinaan keluarga (BKR) dan semakin tingginya kesadaran perempuan terhadap dampak dari perkawinan usia anak. Indikator kedua yaitu persentase balita yang mengikuti PAUD memiliki target 41,53%, realisasi 43,21%, dan capaian 104,05%. Target dapat tercapai karena meningkatnya kesadaran para orang tua terkait manfaat Pendidikan Anak Usia Dini bagi balita dan antusias peserta mengikuti kegiatan kelompok ketahanan Bina Keluarga Balita. Indikator ketiga yaitu persentase lansia yang mendapatkan jaminan sosial memiliki target 39,24%, realisasi 121,06%, dan capaian 308,52%. Target dapat tercapai karena komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh warga Surabaya. Indikator keempat yaitu persentase peserta UPPKA yang meningkat pendapatannya memiliki target 40%, realisasi 42,86%, dan capaian 107,15%. Target dapat tercapai karena tingginya antusias peserta yang mengikuti kegiatan UPPKA.

Program Pengendalian Penduduk dengan indikator persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan memiliki target 30,15%, realisasi 24,45%, dan capaian 81,09%. Target tidak tercapai karena belum maksimalnya kehadiran mitra kerja sebagai perwakilan sekolah tingkat SLTP/MTS.

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan indikator pertama, persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi memiliki target 18,55%, realisasi 21,39%, dan capaian 84,69%. Target tidak tercapai karena ditemukan adanya masalah, baik masalah kesehatan maupun persetujuan pasangan yang menyebabkan sasaran pasangan usia subur tidak memungkinkan untuk menggunakan alat kontrasepsi serta belum optimalnya kepesertaan KB pria. Indikator kedua yaitu persentase pasangan usia subur yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi memiliki target 82%, realisasi 93,41%, dan capaian 113,91%. Target dapat tercapai karena Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB.

Pada bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak terdapat pelaksanaan tiga program sebagai berikut.

Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan dengan indikator pertama, persentase organisasi wanita yang mendapatkan peningkatan kapasitas di sektor

ipoleksosbud memiliki target 100%, realisasi 102,94%, dan capaian 102,94%. Target dapat tercapai karena Organisasi Wanita di Kota Surabaya ikut serta berperan aktif dalam mengikuti berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan dalam sektor politik, ekonomi, hukum dan sosial. Indikator kedua yaitu persentase Perangkat Daerah yang responsif gender memiliki target 100%, realisasi 100%, dan capaian 100%. Target dapat tercapai karena strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Surabaya telah diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah di Kota Surabaya melalui penyusunan dokumen perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG).

Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak dengan indikator persentase perangkat daerah yang menyediakan data gender dan anak memiliki target 100%, realisasi 100%, dan capaian 100%. Target dapat tercapai karena komitmen seluruh perangkat daerah yang melakukan penyusunan data terpilah guna mewujudkan kota surabaya yang responsif gender melalui mudahnya akses data gender secara terpilah yang dapat dimanfaatkan dalam proses perencanaan pembangunan yang berperspektif gender di Kota Surabaya.

Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan indikator persentase Kelurahan Layak Anak memiliki target 47,4%, realisasi 61,69%, dan capaian 130,15%. Target dapat tercapai karena tingginya partisipasi kampung yang menjadi peserta dalam kegiatan Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Anak (KAS RPA) yang merupakan refleksi dari bagaimana Kota Surabaya menjadi Kota Layak Anak (KLA).

Pada bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdapat pelaksanaan tiga program sebagai berikut.

Program Perlindungan Perempuan dengan indikator pertama, kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada perempuan korban kekerasan dan trafficking $\leq 1 \times 24$ jam memiliki target 100%, realisasi 100%, dan capaian 100%. Target dapat tercapai karena sinergitas dalam pelayanan penanganan permasalahan anak pada PD, NGO, Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Anak lainnya. Indikator kedua yaitu persentase lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan perempuan memiliki target 32,25%, realisasi 32,26%, dan capaian 100,03%. Target dapat tercapai karena keaktifan dan kepedulian relawan PKBM serta jejaring yang kuat.

Program Perlindungan Khusus Anak dengan indikator pertama, Kecepatan waktu pelayanan terhadap penanganan permasalahan yang terjadi pada anak korban kekerasan dan trafficking $\leq 1 \times 24$ jam memiliki target 100%, realisasi 100%, dan capaian 100%. Target dapat tercapai karena Kesiapsiagaan dan kepedulian konselor DP3APPKB serta kolaborasi dengan relawan psikolog dari Perguruan Tinggi dalam penanganan permasalahan / pengaduan. Indikator kedua

yaitu persentase 1 lembaga / PKBM yang responsif terhadap perlindungan khusus anak memiliki target 32,25%, realisasi 32,26%, dan capaian 100,03%. Target dapat tercapai karena peran aktif relawan PKBM dalam keterlibatan penanganan permasalahan anak.

Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan indikator Nilai Peringkat Puspaga yang berhasil dicapai memiliki target 209, realisasi 322, dan capaian 154,07%. Target dapat tercapai karena adanya komitmen dalam memenuhi semua komponen penilaian puspaga melalui aspek Program dan Layanan Kegiatan, salah satunya didukung dengan *talkshow*, PUSPAGA goes to school, PUSPAGA Balai RW, live session bersama psikolog terkait pencegahan kekerasan, parenting, dsb. serta aspek sumber daya PUSPAGA salah satunya didukung dengan kolaborasi dengan relawan psikolog dari Perguruan Tinggi.

Pada Sekretariat terdapat pelaksanaan satu program sebagai berikut.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan memiliki target 100%, realisasi 93,04%, dan capaian 93,04%. Nilai tersebut tertera berdasarkan emonev 2022 melalui survei kepuasan pegawai terhadap terpenuhinya kebutuhan akan pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Survei Kepuasan pegawai dihitung dengan parameter ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN, pelaksanaan administrasi umum serta ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran sesuai dengan kebutuhan. Target tidak tercapai karena masih diperlukan optimalisasi pemberian pelayanan kesekretariatan untuk seluruh pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dari 17 indikator program hampir semua target tercapai, hanya beberapa indikator program yang belum tercapai yaitu Persentase kebutuhan ber KB dari pasangan usia subur yang tidak terpenuhi, Persentase mitra kerja yang paham pengetahuan kependudukan, dan Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan. Ketiga indikator tersebut memiliki capaian diatas 80%. Selebihnya pada level kegiatan dan sub kegiatan, data pada tabel 3.3 menunjukkan hampir seluruhnya tercapai. Hal tersebut menunjukkan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 dikerjakan dengan baik sesuai tugas dan fungsinya.

III.2 AKUNTABILITAS ANGGARAN

Dalam subbab ini disampaikan realisasi anggaran yang mengacu pada pagu anggaran PAK Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022. Realisasi anggaran Tahun 2022 merupakan pelaporan keuangan yang termuat dalam aplikasi e-payment dan e-accounting, dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut.

Tabel 3. 5 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp15.278.257.908	Rp10.791.829.392	70,64%
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp15.278.257.908	Rp10.791.829.392	70,64%
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Rp979.104.000	Rp962.895.066	98,34%
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp747.866.000	Rp642.765.480	85,95%
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp327.689.657	Rp310.173.084	94,65%
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp12.820.360.000	Rp8.502.808.000	66,32%
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp403.238.251	Rp373.187.762	92,55%
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp371.711.100	Rp350.200.600	94,21%
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp206.313.000	Rp190.084.600	92,13%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian
	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Rp206.313.000	Rp190.084.600	92,13%
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp165.398.100	Rp160.116.000	96,81%
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Rp45.510.000	Rp45.054.900	99,00%
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Rp119.888.100	Rp115.061.100	95,97%
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		Rp10.415.407.511	Rp5.888.490.191	56,54%
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp523.600.000	Rp495.160.300	94,57%
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Rp483.600.000	Rp461.444.300	95,42%
	Pengendalian Program KKBPK	Rp40.000.000	Rp33.716.000	84,29%
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp1.985.449.599	Rp1.944.476.716	97,94%
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Rp1.144.984.999	Rp1.120.330.716	97,85%
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Rp840.464.600	Rp824.146.000	98,06%
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp7.317.357.912	Rp2.871.417.175	39,24%
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Rp1.002.814.512	Rp653.352.775	65,15%
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Rp5.294.543.400	Rp1.452.101.500	27,43%
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Rp1.020.000.000	Rp765.962.900	75,09%
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Rp589.000.000	Rp577.436.000	98,04%
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Rp189.427.500	Rp189.427.500	100,00%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Rp399.572.500	Rp388.008.500	97,11%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp13.508.832.188	Rp12.733.154.396	94,26%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp10.413.192.093	Rp9.754.548.608	93,67%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp10.413.192.093	Rp9.754.548.608	93,67%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp2.630.966.677	Rp2.579.647.691	98,05%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp2.630.966.677	Rp2.579.647.691	98,05%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp464.673.418	Rp398.958.097	85,86%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp464.673.418	Rp398.958.097	85,86%
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Rp2.138.359.574	Rp1.696.328.114	79,33%
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp732.270.218	Rp594.261.170	81,15%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp732.270.218	Rp594.261.170	81,15%
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp362.024.863	Rp313.054.132	86,47%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp362.024.863	Rp313.054.132	86,47%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp1.044.064.493	Rp789.012.812	75,57%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp1.044.064.493	Rp789.012.812	75,57%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		Rp296.175.042	Rp264.639.753	89,35%
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp296.175.042	Rp264.639.753	89,35%
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp296.175.042	Rp264.639.753	89,35%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Rp487.687.141	Rp480.957.117	98,62%
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp35.377.040	Rp35.154.875	99,37%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp35.377.040	Rp35.154.875	99,37%
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp176.712.000	Rp173.138.850	97,98%
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp113.500.000	Rp111.500.000	98,24%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp63.212.000	Rp61.638.850	97,51%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp275.598.101	Rp272.663.392	98,94%
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp275.598.101	Rp272.663.392	98,94%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		Rp535.997.654	Rp529.527.029	98,79%
	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp535.997.654	Rp529.527.029	98,79%
	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp535.997.654	Rp529.527.029	98,79%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Rp2.491.678.037	Rp2.117.445.791	84,98%
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp558.575.890	Rp401.629.519	71,90%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp558.575.890	Rp401.629.519	71,90%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp1.933.102.147	Rp1.715.816.272	88,76%
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp1.335.268.652	Rp1.201.506.204	89,98%
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi	Rp597.833.495	Rp514.310.068	86,03%

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian
	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Rp1.269.865.858	Rp1.243.820.079	97,95%
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp77.572.960	Rp76.894.099	99,12%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp77.572.960	Rp76.894.099	99,12%
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.115.486.898	Rp1.095.556.488	98,21%
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp916.654.898	Rp904.138.568	98,63%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp198.832.000	Rp191.417.920	96,27%
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp76.806.000	Rp71.369.492	92,92%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp76.806.000	Rp71.369.492	92,92%
Total		Rp46.793.972.013	Rp36.096.392.462	77,14%

Selanjutnya diperlukan perbandingan capaian realisasi kinerja dengan capaian realisasi anggaran pada level tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya untuk melihat efiseinsi penggunaan anggaran. Perbandingan capaian tersebut dapat dilihat pada tabel 3.6, sementara nilai efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3. 6 Capaian Realisasi Kinerja Dan Capaian Realisasi Anggaran Level Tujuan Dan Sasaran

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Bangga Kencana	65,05	61,23	94,13 %	Rp26.065.376.519	Rp17.030.520.183	65,34 %
Mewujudkan keluarga yang berkualitas	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	54,38%	55,47%	102%	Rp15.278.257.908	Rp10.791.829.392	70,64 %
Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	1,78%	1,8%	98,88 %	Rp10.787.118.611	Rp6.238.690.791	57,83 %
	Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita	26	18,9	127,31 %			
Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	93,73	93,9	100,18 %	Rp20.728.595.494	Rp19.065.872.279	91,98 %
Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	84,015	93,66	111,48 %	Rp13.508.832.188	Rp12.733.154.396	94,26 %
Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	83,16%	82,82%	99,59 %	Rp2.434.534.616	Rp1.960.967.867	80,55 %
Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum	81,79%	83,33%	101,89 %	Rp4.785.228.690	Rp4.371.750.016	91,36 %

Tabel 3. 7 Efisiensi Penggunaan Anggaran

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi Anggaran
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Bangga Kencana	94,13%	87,76%	6,37%
1.1	Mewujudkan keluarga yang berkualitas	Indeks pembangunan keluarga (ibangga)	102,00%	85,95%	16,06%
1.2	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)	98,88%	94,37%	4,51%
		Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita	127,31%	94,37%	32,94%
2	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	100,18%	92,15%	8,03%
2.1	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	111,48%	98,05%	13,43%
2.2	Meningkatnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	99,59%	93,44%	6,15%
2.3	Meningkatnya upaya perlindungan perempuan dan anak	Persentase penyelesaian permasalahan perempuan dan anak tanpa melalui jalur hukum	101,89%	89,24%	12,64%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui capaian kinerja berhasil melebihi capaian anggaran, hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran dalam penggunaan sumber daya saat pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan penjabaran perencanaan kinerja dan anggaran Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak seperti yang telah dijelaskan pada bab II, dan penjabaran capaian kinerja dan penyerapan anggaran pada bab III, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait capaian indikator kinerja dan akuntabilitas keuangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dari capaian indikator kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan di perubahan perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022, diperoleh rata-rata nilai capaian 108%. Nilai capaian tertinggi terdapat pada indikator Angka Kelahiran Total (TFR) dengan perolehan capaian 130,77%. Sedangkan nilai capaian terendah terdapat pada indikator Rata-rata kelahiran menurut kelompok umur 15 - 19 (ASFR / Age Spesific Fertility Rate) per 1000 wanita dengan perolehan 97,13%. Dari anggaran yang terdapat pada ke-10 program, rata-rata penyerapan anggaran di masing-masing program adalah 86,47%. Penyerapan anggaran tertinggi terdapat pada “Program Peningkatan Kualitas Keluarga” dengan capaian 98,79%. Sedangkan penyerapan anggaran terendah terdapat pada “Program Pembinaan Keluarga Berencana” dengan capaian 56,54%.

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan melakukan antisipasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dan meningkatkan kapasitas SDM dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih nyata perubahannya.

Surabaya, 20 Februari 2023



Pit. KEPALA DINAS,

NANI SUKRISTINA, S.KM, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP 197001171994032008